

PENGARUH LINGKUNGAN PENUGASAN TERHADAP TINGKAH LAKU MEMPERTAHANKAN WILAYAH NEGARA PADA PRAJURIT PENJAGA PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

Suyanto*, Tb. Zulrizka Iskandar, Maya Rosmayati Ardiwinata, dan R. Urip Purwono

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21., Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
E-mail: suyantostudy@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai penjaga wilayah perbatasan negara, prajurit penjaga perbatasan dihadapkan pada tantangan yang berasal tidak hanya dari luar perbatasan, melainkan juga dari dalam wilayah negaranya. Tantangan tersebut berasal baik dari unsur masyarakat, bentang alam, maupun proses sosial. Oleh karena itu, prajurit perlu memiliki kondisi psikologis yang positif yang merupakan wujud kesiapan prajurit untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mempertahankan wilayah negara di perbatasan. Penelitian ini memfokuskan pada modalitas psikis tentang persepsi lingkungan penugasan, dan diteliti pengaruhnya terhadap tingkah laku mempertahankan wilayah negara. Rancangan penelitian ini adalah *cross-sectional* dengan *mixed-method*, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan dan masing-masing dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Data kuantitatif dijangkau melalui kuesioner, sedangkan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan FGD. Populasi penelitian adalah penjaga perbatasan Kalimantan Barat, dengan sampel berjumlah 666 prajurit yang berasal dari empat batalion dan empat kodim di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *structural equation modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan persepsi signifikan tentang lingkungan penugasan terhadap tingkah laku mempertahankan wilayah negara. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi prajurit tentang lingkungan penugasan di perbatasan Kalimantan Barat cenderung negatif, sedangkan tingkah laku mempertahankan wilayah negara berada pada taraf yang cukup optimal.

Kata kunci: lingkungan penugasan; tingkah laku mempertahankan wilayah negara

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL ASSIGNMENT ON BEHAVIOR OF DEFENDING NATIONAL TERRITORY OF THE GUARD FORCES OF WEST KALIMANTAN BORDER

ABSTRACT

Border guards are faced with challenges that come not only from outside the borders but also from within the territory of their country. These challenges come from elements of society, landscapes, and social processes. Therefore, having a good psychological condition is an important predisposition for the readiness of soldiers to carry out their duties, namely displaying the behavior of defending territory, in the border area of the country. This study focuses on psychic modalities regarding the perception of the assignment environment and examines its effect on the behavior in defending the country's territory. The study is a cross-sectional mixed-method study, where quantitative and qualitative data were collected simultaneously and analyzed to obtain conclusions. Quantitative data was collected through questionnaires, while observations, interviews, and FGDs were used to collect qualitative data. The population of this study is the West Kalimantan border guards, with a sample of 666 soldiers from 4 battalions and 4 military bases along the West Kalimantan border. Structural equation modeling (SEM) was used to test the hypothesis. Study results show a positive and significant influence of the assignment environment on the behavior of defending the territory of the country. Descriptive analysis shows that soldiers' perceptions of the assignment environment on the West Kalimantan border tend to be negative, while the behavior of defending the country's territory is at a fairly optimal level.

Keywords: environment assignment; behavior of defending the territory of the state

PENDAHULUAN

Prajurit penjaga perbatasan negara memiliki persepsi tersendiri tentang lingkungan penugasannya. Lingkungan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat sebagai wilayah penugasan memiliki beberapa karakteristik, antara lain terbatasnya sarana infrastruktur (Tim-Tribun-Pontianak, 2017), kesejahteraan ekonomi yang rendah, dan maraknya kegiatan ilegal (Hardianto, 2012). Kondisi tersebut juga disampaikan oleh para penjaga perbatasan dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Kalimantan Barat (Satgas Pamtas Kalbar) pada Survei tentang Hambatan Tugas tahun 2014. Beberapa lembaga juga menyampaikan pandangannya tentang hal yang sama dan mengonfirmasi fakta tersebut, antara lain dari Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Kodam XII/TPR Tahun 2013 (Pangdam, 2013; Danbrig 19, 2015), Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014 (Dephan, 2014), Ketua DPRD Kalimantan Barat 2013 (Tim-Kelompok-Kerja Kodam XII/Tpr., 2013), dan Badan Nasional Penyangga Perbatasan (BNPP) Tahun 2015.

Kondisi lingkungan tersebut dapat memengaruhi pikiran dan tindakan prajurit dalam mempertahankan wilayah negara. Sebagaimana dinyatakan oleh Kurt Lewin melalui Teori Medan atau *Field Theory* bahwa sistem pengaturan diri atau *field* ditentukan oleh keterhubungan antarbagian di dalam pikiran seorang individu. Sistem pengaturan diri tersebut dapat dipahami dari *life space* atau ruang hidupnya yang terdiri dari elemen-elemen yang berasal dari faktor personal dan lingkungan (Lewin, 1997). Antareleman tersebut saling berhubungan dan menjadi kesatuan *gestalt* yang akan menentukan tingkah lakunya. Oleh sebab itu, Kurt Lewin menyatakan bahwa tingkah laku merupakan fungsi dari pribadi dan lingkungan.

Persepsi tentang lingkungan penugasan dapat dikupas dari pandangan Gibson, dkk (1989) yang mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (Goldstein, E. B., 1981). Berdasarkan konsep TNI AD, kondisi wilayah dan ancaman yang ada merupakan kondisi lingkungan penugasan yang harus diwaspadai. Hal tersebut tercantum pada Surat Keputusan Kasad mengenai Buku Petunjuk Induk tentang Operasi, Skep Kasad (p. 26, 2005) yang menyatakan bahwa pola gelar kekuatan kewilayahan TNI AD mempertimbangkan kondisi geografis, kemungkinan ancaman/daerah rawan konflik, kekuatan yang dimiliki, dan sistem pertahanan semesta. Kondisi lingkungan dapat berupa sarana fisik buatan seperti jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Kondisi alam dapat berupa sungai, rawa, hutan, gunung, dan lain-lain.

Berdasarkan Skep Kasad di atas, aspek yang dipertimbangkan pada pelaksanaan operasi TNI AD selain kondisi lingkungan adalah ancaman yang ada. Sebagaimana dicantumkan pada Buku Putih Pertahanan, ancaman terhadap pertahanan meliputi:

- a. Ancaman yang bersifat tradisional, yaitu agresi atau invasi negara lain.
- b. Ancaman yang bersifat nontradisional, yaitu kegiatan ilegal (seperti pembalakan liar atau *illegal logging*, penambangan liar atau *illegal mining*, perdagangan ilegal atau *illegal trading*, atau perdagangan manusia atau *illegal trafficking*) di perbatasan.

Terkait dimensi-dimensi yang terdapat pada Lingkungan Penugasan ini dapat disimak pada Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/111/VIII yang menyebutkan bahwa aspek pertahanan keamanan negara meliputi aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial yang meliputi kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Dengan demikian, persepsi tentang lingkungan penugasan dapat didefinisikan sebagai proses kognitif individu untuk menafsirkan dan memahami lingkungannya tentang kondisi dan ancaman terhadap keberhasilan penugasannya, dengan operasionalisasi yaitu proses kognitif individu untuk menafsirkan dan memahami kondisi geografi, demografi, dan sosial (meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan keamanan) serta ancaman terhadapnya yang meliputi agresi negara lain dan kegiatan ilegal di perbatasan (Suyanto, 2018).

Tingkah laku mempertahankan wilayah negara dapat dirunut dari pendapat Altman dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa tingkah laku teritorial adalah hubungan antara individu atau kelompok dan kondisi fisik tertentu yang dikarakteristikan dengan perasaan memiliki, mengontrol, dan menggunakan ruangnya (Altman et al., 1980). Disebutkan pula bahwa fungsi teritori manusia adalah a) personalisasi dan penandaan; b) agresi, dan; c) dominasi dan kontrol. Mengenai pertahanan teritorial, Altman tidak memberikan batasan secara eksplisit, namun ia memberikan pengertian bahwa pertahanan teritorial tampak pada meningkatnya pengawasan dan pada saat ancaman meningkat maka pertahanan dilakukan dengan lebih agresif (Altman, 1980). Pengamanan perbatasan negara merupakan pengamanan terhadap teritorial

primer, karena menuntut pengawasan yang ketat dan ancaman hukuman atas pelanggaran untuk memasukinya Iskandar (p. 131, 2012). Selanjutnya, Iskandar juga menyampaikan pandangan bahwa penguasaan teritorial primer untuk menjaga batas wilayah suatu negara memerlukan identitas kebangsaan. Dinyatakan pula bahwa tugas menjaga perbatasan bukan hanya masalah atau beban bagi aparat teritorial saja, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Operasionalisasi pasukan penjaga perbatasan negara mendasarkan pada Pedoman Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat (Kasad, 2009). Pada pedoman tersebut dinyatakan bahwa batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan adalah sepanjang 2,004 km. Tujuan pengamanan wilayah perbatasan adalah:

- a. Mencegah upaya perluasan wilayah darat negara lain yang berbatasan langsung dengan negara Republik Indonesia.
- b. Mencegah kegiatan infiltrasi dari negara lain yang akan melewati wilayah perbatasan darat.
- c. Mencegah kegiatan ilegal melalui perbatasan darat.
- d. Mencegah pemanfaatan wilayah perbatasan sebagai titik pertemuan aktivitas terorisme.

Di samping itu, sasaran pengamanan wilayah perbatasan adalah:

- a. Terwujudnya pertahanan negara di daerah perbatasan.
- b. Terwujudnya kerja sama bilateral RI-Malaysia.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan pengawasan pengamanan perbatasan.
- d. Terwujudnya kondisi wilayah yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.
- e. Terwujudnya penanganan masalah perbatasan secara terintegrasi.
- f. Tercegahnya kegiatan ilegal dan terorisme.

Tujuan dan sasaran pengamanan wilayah perbatasan tersebut menguatkan konsep Altman tentang pertahanan teritorial yang mendapat serangan. Dengan demikian, definisi dari tingkah laku mempertahankan wilayah negara adalah tingkah laku untuk mempertahankan wilayah primer negara yang dikarakteristikan dengan nasionalisme sebagai wujud perasaan memiliki dan militansi sebagai wujud upaya mengontrol dan mempertahankan dari segala gangguan dan ancaman (Suyanto, 2018).

Berdasarkan fenomena dan konsep di atas, maka dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh lingkungan penugasan terhadap tingkah laku mempertahankan wilayah negara pada prajurit penjaga perbatasan negara di Kalimantan Barat.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan adalah *convergent parallel mixed methods*, yaitu desain penelitian yang dilakukan dengan menerapkan metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, menganalisisnya secara terpisah, dan membandingkan hasilnya untuk melihat temuan-temuan penelitian dan apakah satu sama lain saling menguatkan atau tidak (Creswell, 2014). Pengukuran pada semua variabel dilakukan pada kondisi *ex-post facto* (*cross sectional study*). Analisis yang bersifat verifikasi digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan rumusan masalah penelitian, menggunakan uji SEM (*structural equation modeling*) agar dapat melihat pengaruh variabel laten serta untuk mendapatkan model struktural sehingga kontribusi masing-masing dimensi pada variabel laten dapat diketahui (Hooper et al., 2008). Data kuantitatif dijarah melalui dua kuesioner, yaitu kuesioner lingkungan penugasan dan kuesioner tingkah laku mempertahankan wilayah negara. Data kualitatif didapatkan melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan *focus group discussion* (FGD).

Subjek penelitian adalah prajurit penjaga perbatasan negara di Kalimantan Barat dengan kriteria minimal satu kali bertugas menjaga perbatasan (Kalbar) selama sembilan bulan. Populasi terbagi ke dalam 4 batalion dan 4 kodim dengan jumlah total 2,059 tentara. Penelitian ini menggunakan prosedur *sampling* secara stratifikasi dan diperoleh sampel berjumlah 666 dari delapan kluster tersebut, dengan keterwakilan secara proporsional berdasarkan jumlah subjek di masing-masing kluster dan keterwakilan golongan perwira, bintara, dan tamtama. *Response rate* adalah 100%, melalui pengambilan data secara kolektif per kluster untuk seluruh subjek penelitian di masing-masing kluster pada waktu dan tempat yang sama.

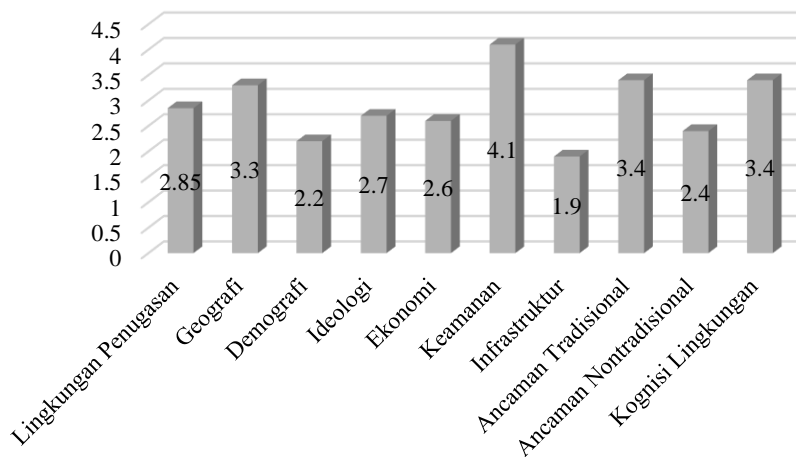
Uji validitas alat ukur dilakukan terhadap 224 prajurit dengan karakteristik yang sama dengan subjek penelitian, dan dianalisis menggunakan CFA. Nilai *loading factor* masing-masing alat ukur berkisar antara .6 – .9, yang bernilai lebih besar dari titik kritis (.5). Dengan demikian, kedua alat ukur memenuhi kriteria validitas berdasarkan standar Hooper (2008). Reliabilitas alat ukur diuji menggunakan pendekatan *Cronbach's Alpha* dengan taraf nyata 5%, menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar .99 untuk kuesioner lingkungan penugasan dan .985 untuk kuesioner tingkah laku mempertahankan wilayah negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan disajikan dengan sekuens berdasarkan variabel. Di setiap sekuens, data kuantitatif akan disajikan terlebih dahulu sebagai data utama dan dilanjutkan dengan data kualitatif. Masing-masing data tersebut dianalisis.

Persepsi tentang Lingkungan Penugasan di Perbatasan Kalimantan Barat

Berikut ini divisualisasikan Gambar 1 tentang persepsi pasukan penjaga perbatasan tentang lingkungan penugasannya, yaitu perbatasan Kalimantan Barat.



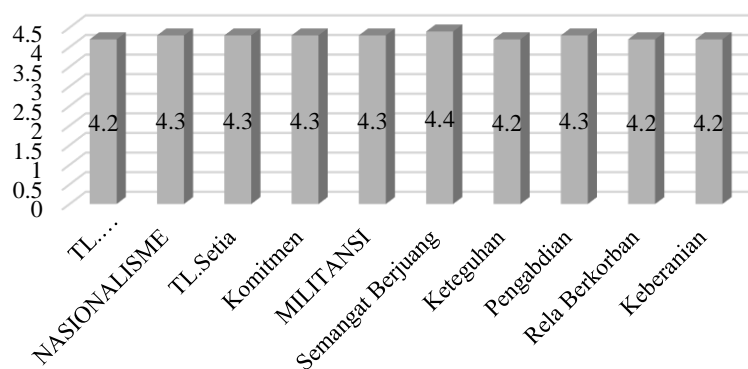
Gambar 1. Persepsi tentang Lingkungan Penugasan di Perbatasan Kalimantan Barat
Sumber: Suyanto (2018)

Berdasarkan Gambar 1, persepsi prajurit tentang lingkungan penugasan secara keseluruhan tergolong negatif, yaitu 2.85 (di bawah 3) dari 5 skala penilaian. Rendahnya taraf pendidikan, kurangnya kesejahteraan secara ekonomi, infrastruktur wilayah yang sangat terbatas, serta maraknya kegiatan ilegal dipersiapkan tidak mendukung ketahanan bangsa. Berdasarkan data kualitatif, dapat diidentifikasi faktor yang memberi kontribusi bagi negatifnya persepsi subjek terhadap lingkungan penugasan, yaitu: a) kondisi demografi yang dianggap menghambat tugas pertahanan negara dalam aspek kualitas penduduk (tingkat pendidikan rendah, orientasi masa depan bidang pendidikan rendah, jumlah sekolah dan guru terbatas); b) kondisi sosial yang dipandang menghambat tugas pertahanan negara, melalui kondisi bahwa penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat lebih mengenal negara tetangga daripada negaranya sendiri; c) kondisi ekonomi yang dipandang menghambat tugas pertahanan negara yang bersumber dari tingginya harga bahan pokok, rendahnya ketahanan pangan, serta kurangnya kesejahteraan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja; d) kondisi infrastruktur yang dipandang menghambat tugas pertahanan negara melalui rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, alat transportasi dan telekomunikasi, dan; e) aspek anKalimantanradisional wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang dipandang menghambat tugas pertahanan negara, yaitu kegiatan ilegal di perbatasan negara (pembalakan liar atau *illegal logging*, penambangan liar atau *illegal mining*, perdagangan ilegal atau *illegal trading*, dan perdagangan manusia atau *illegal trafficking*).

Data kualitatif yang menunjukkan adanya aspek lingkungan perbatasan yang dipersepsi cukup positif adalah kondisi geografis, keamanan, ancaman tradisional, dan kognisi lingkungan. Dalam aspek geografis, wilayah Kalimantan yang umumnya berawa, memiliki sungai yang lebar dan hutan belukar, justru dipersepsi menguntungkan dalam hal pertahanan wilayah negara. Aspek keamanan tidak dipersepsi menghambat tugas pertahanan negara, bahkan dinilai cukup aman, yang memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sehingga mendukung pertahanan negara. Aspek ancaman tradisional tidak dipersepsi menghambat tugas pertahanan negara berdasarkan tidak adanya serangan secara fisik dari negara lain terhadap NKRI. Masih adanya persepsi positif di tengah banyaknya persepsi negatif pada data kualitatif di atas mengonfirmasi posisi skor persepsi lingkungan penugasan di angka 2.86 (skala 4).

Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara

Berikut ini divisualisasikan Gambar 2 tentang Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara pada prajurit perbatasan di Kalimantan Barat.



Gambar 2. Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara
Sumber: Suyanto (2018)

Berdasarkan data di Gambar 2, tingkah laku mempertahankan wilayah negara pada prajurit penjaga perbatasan cukup tinggi, karena dari skala 5, penilaian berada di angka 4.2, yang artinya sesuai definisinya bahwa subjek penelitian secara umum menunjukkan rasa nasionalisme dan militansi yang cukup kuat. Merujuk pada data kualitatif yang relevan, dapat diidentifikasi bahwa perilaku yang dicerminkan oleh angka tersebut dapat dijelaskan berdasarkan dimensi-dimensinya. Pada dimensi nasionalisme, tingkah laku setia meliputi sikap tegas terhadap para pelanggar wilayah yang memasuki wilayah negara tanpa izin resmi atau pelaku kegiatan ilegal yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme tersebut muncul melalui proses internalisasi pada diri subjek, yaitu bahwa wilayah negara yang mereka jaga dianggap atau diperlakukan seolah-olah sebagai wilayah milik pribadi.

Subdimensi kedua dari dimensi nasionalisme, yaitu komitmen, ditunjukkan melalui perasaan suka terhadap tugas menjaga perbatasan, tumbuhnya rasa memiliki terhadap kekayaan alam negara, sikap menimbang keuntungan dan kerugian jika tidak melaksanakan tugas, kesadaran tanggung jawab mereka sebagai tentara untuk menjaga kedaulatan wilayah negara, tumbuhnya perasaan terhormat untuk melaksanakan tugas, dan kesadaran bahwa tugas menjaga kedaulatan wilayah adalah tugas mulia. Militansi, yaitu subdimensi kedua dari tingkah laku mempertahankan kedaulatan wilayah, bernilai 4.3. Perilaku yang merupakan perwujudan dari dimensi militansi (dengan subdimensi semangat berjuang, keteguhan, pengabdian, rela berkorban, dan keberanian) dialami ketika para subjek harus sepanjang waktu mencegah terjadinya pergeseran dan hilangnya patok perbatasan, serta mengidentifikasi dan menghentikan pelaku yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan. Sementara itu, subdimensi pengabdian yang diukur adalah pengabdian pada perjuangan, yang diwakili oleh kesediaan bertugas di wilayah perbatasan negara.

Subdimensi kerelaan berkorban ditandai oleh kerelaan subjek untuk meninggalkan keluarga saat bertugas dan mempertaruhkan jiwa ketika bertugas. Hal mempertaruhkan jiwa tersebut beberapa kali terjadi utamanya ketika mereka menampilkan perilaku untuk melawan kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan. Dalam situasi ini pula subdimensi keberanian ditampilkan.

Keberanian dan tindakan agresif tersebut dilakukan untuk mempertahankan wilayah yang dapat diperlakukan sebagai wilayah primer, yaitu wilayah batas negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Altman (1980) bahwa teritorial primer adalah tempat-tempat yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sudah mendapatkan izin khusus, sehingga pelanggaran terhadap teritorial utama tersebut akan mengakibatkan timbulnya perlawanan dari pemiliknya. Ketika wilayah perbatasan negara yang harus dijaga oleh para subjek sudah diinternalisasi menjadi "wilayah primer" mereka, maka ketidakmampuan untuk mempertahankan teritorial berpeluang akan memunculkan masalah serius dalam aspek psikologis mereka, yaitu dalam hal harga diri dan identitasnya sebagai kekuatan utama penjaga kedaulatan negara.

Secara keseluruhan, tingkah laku mempertahankan wilayah negara pada penjaga perbatasan cukup optimal berdasarkan posisi angka "di atas 4" yang muncul pada semua indikator tiap dimensi. Militansi sebagai dimensi kedua dari Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara terdorong oleh vektor-vektor yang mengarah padanya. Kekuatan dari vektor yang bervalsensi positif dari persepsi tentang lingkungan penugasan, perasaan memiliki dukungan sosial, dan tekanan negatif membuat adanya dinamika tersendiri. Militansi cukup kuat yang ditunjukkan para penjaga perbatasan menunjukkan lebih kuatnya vektor yang bervalsensi positif.

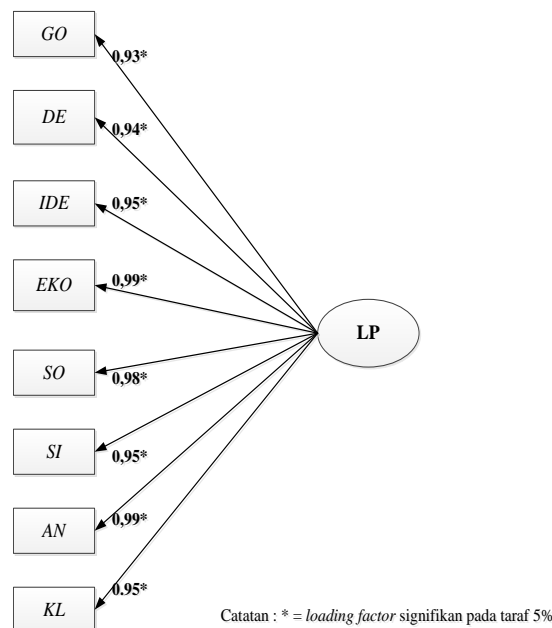
Uji Model Pengukuran dan Model Penelitian

Berikut ini akan diuraikan rincian hasil uji model dalam dua bentuk, yaitu model pengukuran dan model analisis jalur. Model pengukuran dari dimensi-dimensi yang membentuk masing-masing variabel melalui CFA menghasilkan model pengukuran sebagai berikut.

Hasil Uji Model Pengukuran Lingkungan Penugasan

Path Diagram Model Pengukuran Lingkungan Penugasan (LP)

Berikut ini divisualisasikan *path diagram* model pengukuran Lingkungan Penugasan (LP)



Gambar 3. Path Diagram Model Pengukuran Lingkungan Penugasan (LP)

Goodness-of-Fit Statistics Pengujian Model Pengukuran Lingkungan Penugasan (LP)

Berikut ini *goodness-of-fit statistics* pengujian model pengukuran Lingkungan Penugasan (LP).

Tabel 1. Goodness-of-fit statistics pengujian model pengukuran lingkungan penugasan (LP)

Statistik	Kriteria	Hasil	Kesimpulan
<i>Chi-square</i>	$Chi-square / df \leq 3$	6.18 / 6 = 1.03	Fit
<i>Degrees of freedom (df)</i>			
<i>p-value</i>	$\geq .05$.40	Fit

RMSEA		.005	<i>Fit</i>
SRMR	≤ .08	.001	<i>Fit</i>
CFI		1	<i>Fit</i>
AGFI	≥ .95	.99	<i>Fit</i>

Berdasarkan hasil *goodness-of-fit statistics*, dapat disimpulkan model pengukuran Lingkungan Penugasan yang dirumuskan *fit* berdasarkan data empiris. Berikut ini akan diuraikan rincian skor *loading factor* beserta nilai statistik uji T.

Model Pengukuran Lingkungan Penugasan

Tabel 2. *Loading factor* dan nilai statistik uji T pengujian model pengukuran Lingkungan Penugasan (LP)

<i>Variable - Observed</i>	<i>Unstandardized Loading Factor</i>	<i>Standardized Loading Factor</i>	<i>t-value</i>
Geografi (GO)	2.68*	.93*	31.86
Demografi (DE)	1.78*	.94*	32.41
Ideologi (IDE)	2.11*	.95*	32.91
Ekonomi (EKO)	6.62*	.99*	36.03
Sosial (SO)	2.72*	.98*	35.34
Sarana Infrastruktur (SI)	3.60*	.95*	33.19
Ancaman (AN)	6.84*	.99*	35.42
Kognisi Lingkungan (KL)	5.79*	.95*	33.01

Catatan: * = signifikan pada taraf nyata 5%

Kontribusi Tiap Dimensi pada Konstruk Lingkungan Penugasan

Berdasarkan nilai *loading factor* pada model pengukuran di atas berikut ini, disajikan peringkat kontribusi tiap dimensi pada konstruk Lingkungan Penugasan (LP).

Tabel 3. Kontribusi tiap dimensi pada konstruk Lingkungan Penugasan (LP)

<i>Rank Kontribusi</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Nilai Kontribusi</i>
1	Ekonomi (EKO)	.99
2	Ancaman (AN)	.99
3	Sosial (SO)	.98
4	Sarana Infrastruktur (SI)	.95
5	Ideologi (IDE)	.95
6	Kognisi Lingkungan (KL)	.95
7	Demografi (DE)	.94
8	Geografi (GO)	.93

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa kontribusi tiap dimensi pembentuk konstruk Lingkungan Penugasan terkait kondisi Lingkungan Perbatasan dari yang paling besar sampai yang terkecil adalah kondisi ekonomi, ancaman, kondisi sosial, sarana infrastruktur, kondisi ideologi, kognisi lingkungan, kondisi demografi, dan kondisi geografis di wilayah perbatasan. Kondisi ekonomi dan ancaman menempati peringkat teratas dan bernilai sama. Kontribusi pertama atau paling tinggi pembentuk konstruk Lingkungan Penugasan adalah kondisi ekonomi. Dengan demikian, untuk memahami Lingkungan Perbatasan sangat penting untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat perbatasan yang meliputi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, ketahanan pangan masyarakat, ketersediaan teknologi tepat guna untuk mengolah sumber daya alam wilayah perbatasan, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat perbatasan.

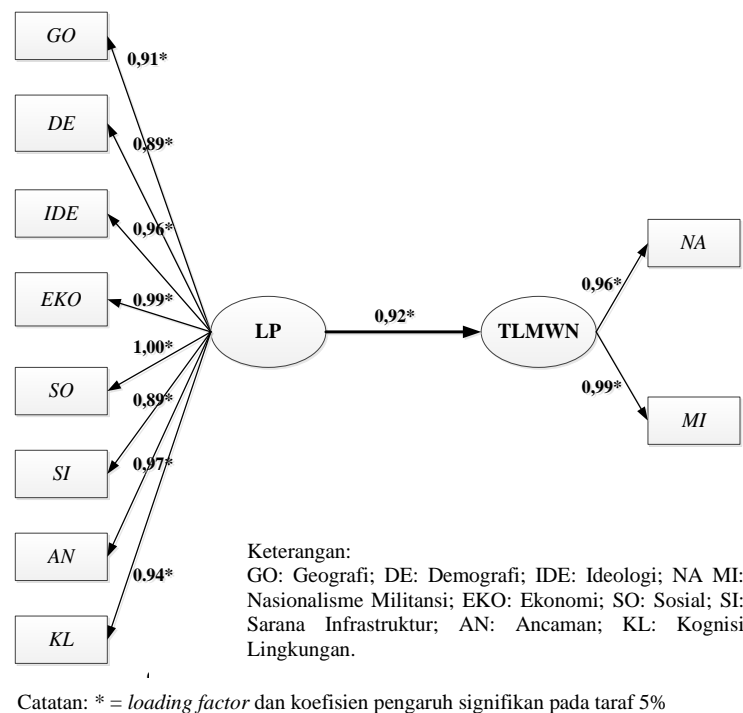
Kontribusi kedua adalah dimensi persepsi tentang ancaman terhadap ketahanan wilayah perbatasan. Hal ini meliputi ancaman tradisional, yaitu ketahanan wilayah untuk menahan agresi negara lain dan ancaman nontradisional yang meliputi ketahanan wilayah sehubungan dengan penggunaan wilayah perbatasan sebagai tempat persembunyian dan lalu lintas teroris, narkoba, imigran gelap, dan kegiatan ilegal. Kontribusi ketiga adalah dimensi sosial yang meliputi wawasan kebangsaan masyarakat

tentang bentuk negara, dasar negara, pemimpin, dan haluan negara sendiri. Kontribusi keempat adalah sarana infrastruktur yang meliputi persepsi para prajurit tentang kondisi jalan dan infrastruktur lain seperti jaringan telekomunikasi, listrik, dan lain-lain. Kontribusi kelima adalah dimensi ideologi, yaitu persepsi pasukan bahwa masyarakat lebih mengenal atau lebih terpengaruh oleh negara lain daripada negara sendiri.

Kontribusi keenam adalah kognisi lingkungan. Dalam hal ini, memperhatikan kognisi lingkungan masyarakat perbatasan merupakan hal tak kalah penting untuk memahami Lingkungan Perbatasan. Kognisi Lingkungan ini meliputi pengetahuan, perasaan, dan tingkah laku masyarakat tentang lingkungannya. Konsep tersebut dapat ditunjukkan melalui pengetahuan masyarakat untuk bercocok tanam dan melestarikan sumber daya alamnya; perasaan mengenai adanya manfaat dari lahan pekarangan dan sumber daya alam; upaya untuk mengolah lahan pekarangan, rawa, dan sumber daya alam wilayah perbatasan. Kontribusi ketujuh adalah dimensi demografi yang meliputi persepsi prajurit tentang tingkat pendidikan masyarakat perbatasan. Kontribusi kedelapan adalah dimensi geografis yang meliputi persepsi pasukan tentang kondisi geografis yang dapat berperan sebagai rintangan maupun hambatan. Contohnya antara lain sungai dan rawa yang dapat merintang pasukan sendiri maupun musuh (para penggiat ilegal) untuk menjangkau wilayah yang terpisahkan oleh rawa maupun sungai tersebut.

Hasil Uji terhadap Hubungan Kedua Variabel

Model struktural pengaruh Lingkungan Penugasan (LP) terhadap Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara (TLMWN) disajikan pada Gambar 4. Hasil uji model menunjukkan data pengaruh LP terhadap TLMWN adalah sebesar .92

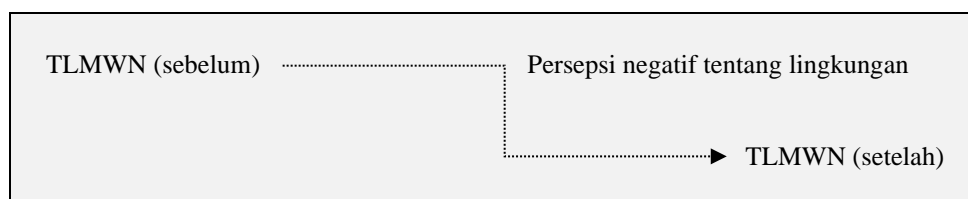


Gambar 4. Model-Model Struktural Pengaruh Lingkungan Penugasan (LP) terhadap Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian model menunjukkan hasil bahwa optimalisasi TLMWN subjek penelitian ditentukan oleh semakin positifnya persepsi mereka tentang LP. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari LP terhadap TLMWN. Dengan demikian, lingkungan yang dipersepsi positif oleh prajurit akan berpengaruh meningkatkan keoptimalan mereka dalam mempertahankan wilayah negara. Sebaliknya, saat mempersepsi negatif maka akan cenderung menurulkannya.

Merujuk pada Teori Medan dari Kurt Lewin, persepsi negatif dapat menciptakan vektor yang bervalensi negatif yang terarah pada tingkah laku. Dengan demikian jika teori tersebut diaplikasikan dalam variabel penelitian ini, maka hubungan di antara kedua variabel dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 5. Pengaruh Lingkungan Penugasan terhadap Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara

Vektor yang bervalensi negatif tersebut berefek menekan sehingga tingkah laku yang dipengaruhi menjadi kurang optimal. Mengingat bahwa dimensi TLMWN adalah nasionalisme dan militansi, maka persepsi negatif terhadap lingkungan perbatasan berpengaruh menurunkan rasa nasionalisme dan tingkah laku yang militan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Temuan ini memperkuat studi Gifford (2011) yang menyatakan bahwa lingkungan, setelah memengaruhi proses psikologi individu, dapat meningkatkan *performance* individu di tempat kerja. Temuan dari penelitian ini juga mendukung konsep Altman (1980) tentang pertahanan teritorial atau *defence of space*. Pada konsep Altman (1980), tingkah laku teritorial merupakan hubungan antara individu atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu yang dikarakteristikkan dengan perasaan memiliki, mengontrol, dan menggunakan ruangnya. Selanjutnya, Altman menyatakan bahwa saat ada ancaman atau persepsi adanya ancaman meningkat, maka perilaku teritorial cenderung menjadi lebih defensif. Bentuk pertahanan wilayahnya adalah meningkatnya pengawasan, memperjelas batasan, dan bertindak lebih agresif (Altman, 1980).

Terdapat dua hal penting dari hasil penelitian ini dalam hubungannya dengan konsep Altman tentang *defence of space*. Pertama, konsep Altman merujuk pada kepemilikan pribadi seperti rumah, pekarangan, dan lain-lain. Penelitian ini melihat tingkah laku untuk mempertahankan wilayah yang semula bukan miliknya pribadi, yaitu wilayah negara. Dengan demikian, untuk menjadikan wilayah negara masuk ke wilayah kepemilikan pribadi, diperlukan proses "internalisasi" sebagai modalitas yang memediasi masuknya wilayah negara menjadi wilayah pribadi. Konsep *defence of space* bisa diaplikasikan hanya jika internalisasi terjadi. Kedua, konsep Altman tentang sikap agresif ketika menghadapi ancaman bersifat generik atau umum. Penelitian ini meletakkan agresivitas pada perilaku yang dalam ruang lingkup militer dikategorikan sebagai "pertahanan", bukan "penyerangan", sedangkan justru konsep "penyerangan" itulah yang lebih dekat pengertiannya dengan konsep agresi dalam pengertian generik yang tampaknya dimaksudkan dalam konsep *defence of space*-nya Altman. Ketiga, dalam hal wilayah *space* yang dibahas dalam teori Altman, terdapat tiga tipe teritorialitas berdasarkan derajat privasi, afiliasi, dan kemungkinan pencapaiannya, yaitu teritorial primer, sekunder, dan publik.

Teritorial primer adalah tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sudah akrab atau yang sudah mendapatkan izin khusus. Teritorial sekunder adalah tempat-tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah saling mengenal, misalnya lahan parkir. Teritorial publik adalah tempat-tempat yang terbuka untuk umum, misalnya jalan raya, gedung bioskop, mal, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka wilayah negara dapat dianggap sebagai teritorial primer, karena wilayah negara hanya dapat dimasuki oleh warga negara lain jika sudah mendapat izin khusus. Pelanggaran terhadap teritorial negara ini akan mengakibatkan perlawanan dari pemiliknya, dalam hal ini oleh para prajurit penjaga perbatasan. Berdasarkan pengertian yang ketiga inilah proses internalisasi sebagai media pengubah kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi, menjadi penting, agar wilayah negara yang dijaga oleh para subjek prajurit penjaga wilayah perbatasan, secara psikologis menjadi teritorial primer bagi mereka.

Model pengukuran Lingkungan Penugasan menunjukkan bahwa persepsi tentang kondisi ekonomi masyarakat dan ancaman di wilayah perbatasan merupakan dimensi yang besar kontribusinya. Oleh sebab itu, hasil temuan ini bermanfaat untuk menyadarkan perlunya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena merupakan salah satu determinan dalam kekuatan pertahanan negara. Adanya kondisi yang saling memengaruhi antara masyarakat dan tentara. Pada kondisi masyarakat perbatasan adalah

adanya kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kesulitan ekonomi ini menimbulkan persepsi yang negatif dari tentara tentang kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Persepsi yang negatif ini akan memberikan beban tambahan pada prajurit untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal ini sesuai dengan doktrin teritorial prajurit yang mendapat tugas pula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut berpotensi menurunkan performa mereka dalam menjaga kedaulatan negara.

SIMPULAN

1. Kesimpulan analisis deskriptif tentang kondisi psikologis prajurit penjaga perbatasan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa:
 - a. Lingkungan Penugasan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dipersepsi negatif atau menghambat pertahanan negara.
 - b. Tingkah laku mempertahankan wilayah negara pada penjaga perbatasan cukup optimal, artinya memiliki rasa nasionalisme dan militansi yang cukup.
2. Kesimpulan terkait tujuan penelitian, bahwa penelitian ini telah mendapatkan bukti empiris tentang hal-hal sebagai berikut: Lingkungan Penugasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara. Artinya persepsi tentang Lingkungan Penugasan yang makin positif akan berpengaruh pada Tingkah Laku yang makin optimal dalam mempertahankan wilayah negara.
3. Pengembangan Ilmu Psikologi pada penelitian ini adalah:
 - a. Pengembangan konsep Pertahanan Teritorial atau *Defense of Space* dari Irwin Altman (1980). Pengembangan konsep tersebut adalah mengenai Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara, yaitu saat seseorang mempertahankan wilayah yang semula bukan miliknya secara pribadi, melainkan milik negaranya. Dengan demikian, mereka harus menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme dan bersikap militan.
 - b. Nasionalisme dan militansi adalah dua dimensi baru dari peneliti berdasarkan hasil telaah dari laporan Satuan Tugas Penjaga Perbatasan, konsep pertahanan TNI AD pada pertahanan negara, serta konsep-konsep sebelumnya. Kedua dimensi tersebut belum pernah disebutkan oleh Irwin Altman pada pertahanan wilayah. Altman memberikan pandangan yang bersifat umum pada buku *Human Behavior and Environment* (1980), dengan menyatakan bahwa seseorang akan mengembangkan alternatif strategi saat menghadapi ancaman, yaitu: pertama, mempertahankan dengan lebih agresif (*more aggressive defence*) dan kedua, mundur pada posisi bertahan.
 - c. Pengaruh variabel-variabel yang belum pernah disinggung Altman serta peneliti yang lain yaitu pengaruh Lingkungan Perbatasan terhadap Tingkah Laku Mempertahankan Wilayah Negara. Guna pengembangan Ilmu Psikologi, maka pada masa yang akan datang, penelitian selanjutnya dapat meneliti dan mengembangkan doktrin pertahanan negara. Hal tersebut khususnya untuk menjawab pertanyaan “bagaimanakah pengaruh doktrinasi tentara terhadap pembentukan sikap dan perilaku serta resiliensi prajurit yang biasanya hidup di perkotaan kemudian ditempatkan pada lokasi di perbatasan”. Demikian juga fungsi kepemimpinan, penyesuaian diri, komitmen organisasi, faktor kepribadian, dan fungsi-fungsi psikologi lainnya akan dapat berpengaruh pada performa prajurit penjaga perbatasan negara.

Berdasarkan pandangan para penjaga perbatasan yang tertuang pada model pengukuran Konstruk Lingkungan Penugasan, ternyata kondisi ekonomi masyarakat dan ancaman/gangguan di wilayah perbatasan adalah dua dimensi yang paling besar kontribusinya pada konstruk Lingkungan Penugasan. Dengan demikian, dalam rangka peningkatan kekuatan pertahanan keamanan, disarankan adanya penekanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan. Di samping itu juga perlu ditekankan upaya pencegahan dan penindakan yang tegas terhadap para penggiat ilegal di perbatasan yang merugikan negara.

Perlu penanganan secara terpadu antara segenap komponen bangsa dalam pembangunan pertahanan negara di wilayah perbatasan. Segenap komponen bangsa tersebut meliputi tentara, polisi, masyarakat, Badan Nasional Penyangga Perbatasan (BNPP), aparat pemerintah daerah yang

bertanggung jawab terhadap pembangunan sarana infrastruktur, pendidikan, telekomunikasi, kesehatan, dan lain-lain. Tiap komponen bangsa perlu menyadari bahwa kegagalan pada satu bidang akan menghambat pencapaian ketahanan bangsa pada aspek yang lain. Oleh sebab itu, segenap komponen bangsa perlu berkiprah sesuai bidang masing-masing.

Dalam rangka penguatan pertahanan negara di Kalimantan Barat, maka diperlukan beberapa hal:

- a. Perbaiki Infrastruktur. Perbaiki infrastruktur ini yang utama adalah sarana jalan yang menghubungkan antarwilayah. Sarana jalan ini bukan hanya berfungsi sebagai jalan utama di sepanjang perbatasan, tetapi juga menghubungkan desa dengan desa lain, kecamatan, dan kabupaten. Sarana ini akan memudahkan mobilitas masyarakat, penjaga perbatasan dalam memasarkan hasil bumi, juga menjangkau sarana pendidikan, kesehatan, dan melapor pada pos TNI saat mendapati kegiatan ilegal dan lain-lain.
- b. Teknologi tepat guna dalam bidang pertanian. Teknologi ini meliputi:
 - 1) Teknologi pengolahan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Lahan gambut di wilayah Kalimantan Barat memiliki ketebalan mulai dari beberapa sentimeter sampai dengan puluhan meter dan berair (membentuk rawa). Agar dapat ditanami, lapisan gambutnya harus diambil dan diganti dengan tanah. Kondisi ini cukup menantang sehingga perlu ditemukan teknologi penggantian lahan dengan tanah, teknologi penghancur lahan gambut (bukan dibakar) sehingga menjadi bagian dari tanah, atau penemuan dalam bentuk lain sehingga lahan dapat ditanami. Teknologi ini dapat diikuti dengan teknologi irigasi dan pemupukan.
 - 2) Teknologi budi daya tanaman yang dapat hidup pada lahan gambut atau lahan yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Dalam pandangan peneliti, sebenarnya yang perlu diberdayakan adalah kemampuan masyarakat perbatasan untuk mengeksplor hasil bumi mereka. Melalui observasi ke wilayah perbatasan, tampak bahwa sekalipun sebagian besar lahan Kalbar belum dimanfaatkan secara produktif, namun banyak pula hasil bumi yang dapat dipasarkan ke Malaysia, di antaranya pala, buah-buahan, sawit, dan lain-lain.
- c. Sebaiknya lebih ditingkatkan peran Forkominda atau Forum Komunikasi Daerah (yang sebelumnya bernama Muspida—Musyawarah Pimpinan Daerah) untuk meningkatkan kesepahaman tentang tugas semua komponen bangsa dalam mempertinggi ketahanan bangsa. Forum tersebut juga berperan penting untuk mengurangi ego sektoral terkait tugas yang diberikan presiden kepada aparat teritorial TNI AD untuk mencetak sawah dari lahan nonproduktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, I. (1975). *Culture and environment*. New York, USA: Press Syndicate, Cambridge,.
- Altman, I., Rapoport, A., & Wohlwill, J. F. (1980). *Human behavior and environment: advances in theory and research (Vol. 4: environment and culture)*. Springer Science+Business Media, LLC.
- Creswell, J. W., & Clark, VLP. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 4th ed.* Los Angeles: Sage.
- Danbrig 19, K. (2015). *Laporan kesiapan awal Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia Yonif 644/ Walet Sakti*. Brigif Infanteri 19.
- Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (2011). *IAAP handbook of applied psychology*. Blackwell Publishing.
- Goldstein, E. B. (1981). *The ecology of J. J. Gibson's perception*, 14(3), 191-195.
- Hardianto, B. C. (2012). *Strategi operasi keamanan perbatasan darat dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan Propinsi Kalimantan Barat*. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 6(1), 53-60.
- Iskandar, T. Z. (2012). *Psikologi lingkungan: teori dan konsep*. Bandung: Refika Aditama.

- Kasad. (2009). *Peraturan kasad nomor Perkasad/94/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang buku petunjuk pelaksanaan pedoman pengamanan wilayah perbatasan darat*. Jakarta: TNI AD.
- Kemenhan. (2014). *Buku putih pertahanan Indonesia 2014*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Lewin, K. (1997). *Resolving social conflicts and field theory in social science*. American Psychological Association.
- Metcalf, A. (2003). *Nationalism: introduction, Oswego City School District regents exam prep center, 1999-2003*. Diambil kembali dari Regents Prep: Global History.
- Pangdam, XII. Tpr. (2013). *Laporan pelaksanaan dan evaluasi operasi pengamanan perbatasan RI-Malaysia TA. 2013*. Pontianak: Kodam XII/Tpr.
- Suyanto. (2018). *Pengaruh lingkungan penugasan dan dukungan sosial terhadap tingkah laku mempertahankan wilayah negara melalui moril sebagai mediator pada prajurit penjaga perbatasan Kalimantan Barat*. Universitas Padjadjaran.
- Tim Kelompok Kerja Kodam XII/Tpr. (2013). *Optimalisasi pembangunan perbatasan Kalbar-Malaysia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pertahanan negara*. Kodam XII Tanjungpura.
- Tim Tribun Pontianak. (2017). *Video tim pengantar bantuan Presiden Jokowi hadapi medan berat menuju Sungkung*. Diambil pada 14 April 2017 dari <http://pontianak.tribunnews.com/2017/04/14/video-tim-pengantarbantuan-presiden-jokowi-hadapi-medan-berat-menuju-Sungkung>.